

PROBLEM AGRARIA,
SISTEM TENURIAL ADAT,
DAN **BODY OF KNOWLEDGE ILMU AGRARIA-
PERTANAHAN**

Tim Peneliti Sistematis STPN, 2015

Penyunting:
M. Nazir Salim

Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (PPPM)
Bekerja sama dengan
STPN Press, 2015

Problem Agraria, Sistem Tenurial Adat,
dan *Body of Knowledge* Ilmu Agraria-Pertanahan

©PPPM STPN

Diterbitkan pertama kali dalam bahasa Indonesia oleh:
Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (PPPM)

Bekerja sama dengan

STPN Press, Desember 2015
Jl. Tata Bumi No. 5 Banyuraden, Gamping, Sleman
Yogyakarta, 55293, Tlp. (0274) 587239
Fax: (0274) 587138
Website: www.pppm.stpn.ac.id
E-mail: stpn.press@yahoo.co.id

Penulis: Tim Peneliti Sistematis STPN 2015
Penyunting: M. Nazir Salim
Proofread: Asih Retno Dewi
Layout: Nanjar
Disain Cover: la iq

Problem Agraria, Sistem Tenurial Adat,
dan *Body of Knowledge* Ilmu Agraria-Pertanahan
(Hasil Penelitian Sistematis STPN 2015)
STPN Press, 2015
xvii + 356 hlm.: 15,5 x 23,5 cm
ISBN: 978-60278928-0

BODY OF KNOWLEDGE PERTANAHAN

Arief Syaifullah
Nuraini Aisiyah
Rochmat Martanto

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tantangan terbesar terkait jati diri sebuah perguruan tinggi adalah *body of knowledge* program studinya. Sebagai perguruan tinggi satu-satunya di Indonesia yang mengkaji pertanahan sejak 1963, STPN telah banyak berperan dalam menghasilkan lulusan yang “profesional” di bidang pertanahan. Namun demikian, jati diri pertanahan sebagai sebuah studi atau “ilmu” masih harus terus diperjuangkan. Perbedaan antara ilmu atau studi yang satu dengan lainnya dapat dilihat dari *body of knowledge* ilmu atau studi tersebut. *Body of knowledge* suatu program studi bersifat unik. Perbedaan yang nyata antar program studi dalam hal tersebut belum dirumuskan secara gamblang.

Selama ini, STPN barulah merumuskan capaian kompetensi masing-masing program. Capaian pembelajaranpun telah dirumuskan. Namun demikian, kompetensi dan capaian pembelajaran tersebut belumlah cukup untuk menjadi identitas substantive program studi. Oleh karena itu, penting untuk dicari jawaban bagaimanakah *body of knowledge* program studi pertanahan yang diajarkan di STPN.

Mengapa *body of knowledge* penting. Suatu profesi dibangun atas dasar pengetahuan, keterampilan, dan pendidikan. Pengetahuan, keterampilan, dan pendidikan yang manakah yang perlu diberikan untuk membangun profesi tersebut tertuang dalam *body of knowledge*. Greenfeld J (2010) menyatakan bahwa *body of knowledge* profesi perlu dirumuskan karena akan dapat (1) untuk merumuskan ruang lingkup profesi, (2) mendapat pengakuan untuk keperluan pendidikan tinggi, (3) untuk kepentingan bisnis, dan (4) untuk pengembangan beasiswa profesi, (5) untuk mempromosikan profesi, dan (6) untuk pembeda kontribusi substantif.

Keempat faktor pertama merupakan faktor internal sedangkan sisanya merupakan faktor eksternal.

Selain keenam faktor tersebut, dalam konteks pendidikan tinggi pertanahan *body of knowledge* perlu dirumuskan dalam kaitannya perlunya pengakuan profesi pertanahan. Isu penting pertanahan sebagai sebuah profesi telah beberapa kali dilontarkan oleh Bp Hendarman Supanji yang saat itu selaku Kepala BPN. Harapannya, dengan profesi yang diakui, pegawai pertanahan semakin kokoh, percaya diri dalam melakukan tugas “keprofesiannya” tanpa harus bimbang, takut melaksanakan tugas jika itu telah terwadahi dan sesuai dengan profesinya. Tambahan lagi, *body of knowledge* penting dalam kaitannya dengan akreditasi Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.

Dalam kaitannya dengan akreditasi program studi atau pun institusi, *body of knowledge* pertanahan merupakan rumusan yang haruslah ada. Ketika mengakreditasi STPN, assessor dari Badan Akreditasi Nasional PT (BAN PT) mempertanyakan bagaimana bentuk dari pohon ilmu program studi STPN. Pohon ilmu yang ditanyakan tersebut tentunya tidak lain adalah bagian dari *body of knowledge*. Selain itu dalam konstelasi keilmuan yang dirancang dikti, pertanahan belum memiliki rumpun keilmuan yang baku. Usulan untuk dapat memposisikan pertanahan dalam suatu slot keilmuan tidaklan mungkin jika *body of knowledge* pertanahan belum terumuskan dengan baik. Sebagai informasi, oleh Komisi Nasional Akreditasi Pranata Penelitian dan Pengembangan (KNAPP) Kementerian Riset dan Teknologi kajian penelitian STPN dikategorikan pada konsentarsi *Land and Agraria Studies* dengan lokus *Policy and Political Science*. Apakah katagori ini sudah tepat? Tentu untuk menjawabnya perlu dilakukan kajian tentang *body of knowledge* pertanahan.

Hadirnya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 73 tahun 2013, No. 49, 81 dan 87 tahun 2014, nama program studi harus menggambarkan *body of knowledge* yang benar yang dicerminkan dalam rumusan Capaian Pembelajaran (CP) dari setiap Program Studi. Penetapan rumusan Capaian Pembelajaran yang benar sesuai dengan *body of knowledge* yang benar akan menjadi dasar penetapan predikat akreditasi program studi yang berbasis pada adanya bukti penulisan CP dan ketercapaian CP, serta dalam penentuan LAM yang akan mengakreditasi. Dengan demikian, bagi program studi yang memiliki bidang keilmuan (*body of knowledge*) yang berdekatan, wajib dapat membedakan CP-nya berdasarkan jenis

dan tingkatan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) program studinya.

Dalam hal penyelenggaraan pendidikan, STPN selain mengacu pada peraturan yang berlaku di Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) juga mengacu pada peraturan yang berlaku di Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi. Dengan kata lain, STPN tunduk pada peraturan yang berlaku di Kementerian ATR, dan tunduk pada peraturan yang dikeluarkan Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi. Sebagai contoh dalam menyusun kurikulum program studi, STPN mengakomodir kepentingan dan kebutuhan kelembagaan Kementerian ATR tetapi tidak dengan mengabaikan standar penyusunan kurikulum yang telah digariskan Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi.

Upaya untuk merumuskan ilmu agraria telah dilakukan pada 2014 melalui riset STPN oleh Sutaryono dkk (2014), dan Pujiriyani DW dkk (2014). Kajian Sutaryono dkk merupakan telaah awal ilmu agraria dari tinjauan filsafat ilmu tentang ilmu agraria yang lintas disiplin. Dalam simpulannya dinyatakan bahwa (1) ruang lingkup agraria tidak sekedar tanah tetapi juga sumberdaya, (2) konsep agraria bukanlah sektor tetapi merupakan sistem, (3) adanya implikasi keilmuan yang inter dan transdisipliner, kelembagaan pendidikan agraria yang tidak semata-mata teknis tetapi holistik komprehensif, dan tingkat kebijakan yang tidak tersektorisasi tetapi kebijakan sebagai sebuah sistem. Pada intinya dikatakan bahwa agraria itu sebagai sebuah sistem. Namun demikian hasil tersebut belum menjelaskan *state of the art* kajian agraria, atau bahkan *body of knowledge* pertanian. Tinjauan filsafat ilmu (epistemologi, ontologi, dan aksiologi) yang dilakukannya dalam mengkaji keagrariaan masih samar dalam hasil penelitiannya. Kiranya pendekatan kajian agraria dari sudut pandang filsafat menemukan jalan yang tidak mudah.

Pujiriyani DW dkk (2014), melalui berbagai publikasi ilmiah agraria yang ada, mencari ciri khas metode atau instrument yang digunakan dan bagaimana digunakannya dalam riset-riset keagrariaan, sekaligus pengembangan metodologisnya. Dalam simpulannya dinyatakan bahwa peneliti agraria menggunakan metoda yang beragam bergantung pada permasalahan yang akan dipecahkan. Penelitian agraria dibagi menjadi tiga ranah: penelitian akademik, penelitian kebijakan, dan penelitian partisipatoris. Penelitian agraria dinyatakan lengkap jika mengkombinasikan ketiga ranah tersebut. Penelitian yang lintas disiplin

direkomendasikan untuk dapat dilakukan agar hasil penelitiannya lebih luas dan akan menjawab permasalahan agraria secara tepat. Namun demikian, dalam hasil penelitian tersebut tidak dibahas tentang keilmuan agraria terlebih tentang *body of knowledge* pertanian.

Dari dua peneliti tersebut dapat disimpulkan bahwa kajian agraria akan mengenai sarasannya jika kajian yang dilakukan bukan monodisiplin; bisa berbentuk lintasdisiplin, multidisiplin, atau transdisiplin.

B. Rumusan Masalah

Dalam menyusun *body of knowledge* pertanian, masalah pertama yang muncul adalah terkait pengertian istilah *body of knowledge* itu sendiri. Istilah *body of knowledge* sering digunakan sebagai kerangka acuan pada disiplin ilmu tertentu, dan pendidikan profesi tertentu. Kejelasan pengertian *body of knowledge* dan ilmu menjadi bagian penting untuk dapat menyusun *body of knowledge* pertanian. Kejelasan yang membedakan terminologi ilmu dan *body of knowledge* kiranya merupakan masalah awal yang penting.

Body of knowledge sebuah profesi atau ilmu tidak hadir begitu saja. Keberadaannya tentu melalui tahapan-tahapan dan proses yang panjang. Oleh sebab itu, kiranya menjadi cara yang tepat jika dapat dipelajari proses atau tahapan penyusunan *body of knowledge* dari ilmu-ilmu atau suatu profesi lain. Dari pengalaman dari *body of knowledge* ilmu-ilmu atau suatu profesi tersebut, dapat diambil komponen-komponen penting yang selanjutnya dapat diterapkan bagi penyusunan *body of knowledge* pertanian.

Kajian pertanian sebagai sebuah ilmu atau profesi telah banyak dilakukan tidak hanya di Indonesia tetapi juga di luar negeri. Banyak pakar pertanian yang mengkaji pertanian dari berbagai sudut pandang. Dalam kaitan ini, perkembangan kajian-kajian pertanian terkait seperti manajemen pertanian, administrasi pertanian, kadaster penting diketahui agar dapat memberikan landasan atau gantungan bagi *body of knowledge* atau ilmu pertanian.

STPN sebagai lembaga pendidikan di bidang pertanian memiliki kurikulum program studi pertanian yang di dalamnya terdapat capaian pembelajaran. Kiranya komposisi proporsi ilmu-ilmu yang diajarkan di pertanian STPN dapat dilihat dengan menganalisis kurikulum tersebut.

Atas dasar semua itu kiranya penting dilakukan penelitian tentang

body of knowledge pertanian yang akan menjawab pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Apa beda *body of knowledge* ilmu dan profesi?
2. Bagaimanakah *body of knowledge* suatu ilmu atau profesi dirumuskan?
3. Bagaimanakah pengertian konsep-konsep terkait “ilmu” pertanian?
4. Bagaimanakah *body of knowledge* pertanian atas dasar kurikulum pertanian STPN?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian eksploratif dengan melakukan studi pustaka. Studi pustaka dilakukan melalui internet pada khususnya artikel-artikel yang dipublikasikan oleh *Fédération Internationale des Géomètres* (FIG). FIG adalah suatu lembaga internasional bergengsi kumpulan para surveyor professional kelas dunia saling berkomunikasi, melakukan pertemuan dalam even-even ilmiah, membuat publikasi ilmiah dalam berbagai hal terkait pengembangan profesi surveyor. Selain dari FIG, dalam hal pengertian atau definisi dikutip dari Wikipedia dan Estopedia. Sumber pustaka lainnya yaitu dari peraturan-peraturan terkait dan publikasi STPN press.

Tahapan penelitian sebagai berikut:

1. Mengkaji perbedaan *body of knowledge* ilmu dan profesi. Dalam kaitan ini dieksplorasi pengertian *body of knowledge*, komponen penyusun *body of knowledge*, pengertian ilmu, syarat-syarat ilmu, indikator ilmu, disiplin ilmu dan studi.
2. Mengkaji proses perumusan *body of knowledge* dan ilmu. Dalam kaitan ini dilakukan dengan mempelajari perumusan *body of knowledge* surveying, dan perumusan ilmu Administrasi Pertanian.
3. Mengkaji pengertian konsep-konsep terkait “ilmu” pertanian. Dalam hal ini dilakukan dengan mengkaji paradigma baru dalam manajemen pertanian, administrasi pertanian, sistem kadaster, dan agraria.
4. Mengkaji *body of knowledge* pertanian atas dasar kurikulum pertanian STPN 2014. Dalam hal ini, dilakukan dengan cara mengkaji capaian pembelajaran Program Studi Diploma IV Pertanian STPN, dan memaparkan serta menganalisis kurikulum Program Studi Diploma IV Pertanian STPN.
5. Memproyeksikan pertanian sebagai ilmu di masa mendatang dengan

mebagi ke tiga ranah: fisik keruangan, hukum dan administrasi, dan sosial ekonomi budaya. Selain itu di bahas juga tentang bagaimana prodesi pertanahan di masa mendatang serta bagaimana peran STPN dalam kajian-kajian pertanahan.

6. Membuat kesimpulan dan saran.

D. Tujuan penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui beda *body of knowledge* ilmu dan profesi;
2. Mengetahui *body of knowledge* suatu ilmu atau profesi dirumuskan;
3. Mengetahui pengertian konsep-konsep terkait “ilmu” pertanahan;
4. Mengetahui *body of knowledge* pertanahan atas dasar kurikulum pertanahan STPN.

E. Manfaat peneltian

Penelitian ini bermanfaat bagi:

1. Bagi STPN memberikan kontribusi existensi STPN dalam hal substansi kajian pertanahan.
2. Bagi Kementrian Agraria dan Tata Ruang / BPN memberikan kontribusi dalam mewujudkan keprofesian pertanahan di Indonesia.

BAB II

BODY OF KNOWLEDGE DAN ILMU

A. *Body of knowledge*

Bagian awal tinjauan pustaka yang penting untuk dibahas adalah menyamakan pengertian tentang *body of knowledge*. Apa beda *body of knowledge* dan ilmu; apa beda *body of knowledge* pertanian dan ilmu pertanian?

1. Pengertian *body of knowledge*

Body of knowledge adalah seperangkat lengkap tentang konsep, istilah, dan kegiatan yang membentuk domain para profesional, sebagaimana yang didefinisikan oleh masyarakat cendikia atau asosiasi professional. *body of knowledge* merupakan representasi pengetahuan dari serangkaian pengetahuan . Secara teoritis, *body of knowledge* adalah: (1) Pengetahuan yang terstruktur yang digunakan oleh anggota dari suatu disiplin untuk memandu praktik atau kerja mereka, (2) Agregasi pengetahuan unik yang diharapkan dikuasai individu untuk dipertimbangkan atau disertifikasi menjadi professional, (3) Himpunan standar yang disetujui dan disepakati dalam suatu bidang atau profesi, (4) Himpunan pengetahuandalam suatu profesi atau subject / materi yang disepakati secara garis besar baik sebagai hal yang diketahui baik secara esensi dan personal, (5) Domain spesifik ontology yang disepakati. *body of knowledge* tidak hanya sekedar kumpulan istilah; daftar bacaan professional; suatu pustaka; website atau kumpulan website; deskripsi kerja professional; atau kumpulan informasi (*wikipedia*).

Dalam *investopedia*, *body of knowledge* adalah inti pengajaran, keterampilan dan penelitian dalam suatu bidang atau industri. *body of knowledge* sering merupakan dasar pembentukan kurikulum bagi kebanyakan program profesional atau gelar. *body of knowledge* adalah

kompetensi penting yang dikuasai oleh anggota, untuk memperoleh akreditasi sebelum menerapkan prinsip-prinsip ini dalam praktik / kerja. Penguasaan *body of knowledge* umumnya ditempuh melalui ujian yang ketat dengan sekali tahapan atau secara berjenjang. Karena seperangkat kompetensi utama dan keahlian yang diperlukan untuk hampir setiap profesi berkembang dan berubah sepanjang waktu, *body of knowledge* bersifat dinamis, untuk menggabungkan informasi dan teknik baru, dan mempertahankan relevansi kurikulum .

Dari penjelasan di atas dapat ditarik beberapa komponen kunci tentang *body of knowledge*. Pertama, adanya seperangkat pengetahuan, keterampilan atau kompetensi penting yang terstruktur dan terstandar. Kedua, *body of knowledge* diakui oleh masyarakat profesi. Ketiga, *body of knowledge* merupakan inti dari pembelajaran. Keempat, seseorang dikatakan menguasai *body of knowledge* atau tersertifikasi setelah menempuh ujian yang ketat. Kelima, *body of knowledge* bersifat dinamis. Semua komponen tersebut dapat dijadikan kerangka untuk mendeskripsikan *body of knowledge* suatu profesi.

Selanjutnya apakah profesi itu. Banyak definisi tentang profesi. Salah satu definisi dari *Annual General Meeting of the Australian national organization of professional associations*, 26 May, 1997, dinyatakan:

“A profession is a disciplined group of individuals who adhere to ethical standards and hold themselves out as, and are accepted by the public as possessing special knowledge and skills in a widely recognized body of learning derived from research, education and training at a high level, and who are prepared to apply this knowledge and exercise these skills in the interest of others”
[<http://www.professions.com.au/definitionprofession.html>].

Atas dasar definisi di atas, profesi adalah kumpulan orang dalam suatu disiplin yang mematuhi standar-standar etika dan diakui oleh masyarakat. Seorang profesional memiliki pengetahuan dan keterampilan khusus dalam suatu kurikulum pembelajaran yang diakui secara luas yang diturunkan dari penelitian, pendidikan atau pelatihan pada tingkat tinggi (*pendidikan tinggi*). Seorang profesional siap menerapkan ilmu dan menggunakan keterampilannya untuk kepentingan / keperluan orang lain.

Greenfeld J (2010) menyatakan bahwa suatu profesi disusun atas pengetahuan, keterampilan dan pendidikan. Pada *body of knowledge-*

profesi haruslah didefinisikan adanya pengetahuan, keterampilan dan pendidikan yang diperlukan. Dari pernyataan tersebut, perlu digarisbawahi bahwa *body of knowledge* terkait dengan suatu profesi. Sebagai contoh seorang yang berprofesi sebagai Surveyor haruslah memiliki pengetahuan, keterampilan dan pendidikan *surveying* yang terhimpun dalam *body of knowledge surveying*. Dengan kata lain, seorang yang berprofesi sebagai “ahli pertanahan” haruslah memiliki pengetahuan pertanahan, keterampilan tentang pertanahan dan pendidikan pertanahan terhimpun dalam *body of knowledge* pertanahan.

2. Komponen penyusun *body of knowledge* Pertanahan

Jika pertanahan sebagai sebuah profesi, maka untuk menggambarkan *body of knowledge* pertanahan, perlu dirinci empat komponen pertama yang mendefinisikan *body of knowledge* di atas. Sifat dinamis yang merupakan ciri *body of knowledge* yang dapat diketahui jika eksistensi *body of knowledge* itu sendiri telah jelas. Oleh sebab itu, pada analisis awal ciri yang kelima tidaklah perlu diamati keberadaannya.

Selanjutnya, dari lima komponen tersebut dibuat pertanyaan yang mengarah pada eksistensi *body of knowledge* Pertanahan; lihat tabel 1. *body of knowledge* sebagai seperangkat pengetahuan, keterampilan atau kompetensi penting perlu ditelusuri dengan mencari jawaban apa dan bagaimana seperangkat pengetahuan, keterampilan atau kompetensi penting sebagai penyusun *body of knowledge* Pertanahan.

Apa sajakah profesi yang terkait berhubungan dengan pertanahan. Pengakuan profesi terkait itu terhadap *body of knowledge* pertanahan menjadi penting sehingga perlu ditelusuri adakah pengakuan masyarakat profesi terhadap *body of knowledge* Pertanahan.

Tabel 1. Komponen *body of knowledge* dan *body of knowledge* Pertanahan

No.	Komponen <i>body of knowledge</i>	<i>Body of knowledge</i> Pertanahan
1	Seperangkat pengetahuan, keterampilan atau kompetensi penting	Apa dan bagaimana seperangkat pengetahuan, keterampilan atau kompetensi penting penyusun <i>body of knowledge</i> Pertanahan?
2	Pengakuan masyarakat profesi	Adakah masyarakat profesi pertanahan yang terkait? Adakah pengakuan masyarakat profesi terhadap <i>body of knowledge</i> Pertanahan?

3	Sebagai inti pembelajaran	Bagaimanakah <i>body of knowledge</i> pertanahan dirumuskan sebagai inti pembelajaran di Perguruan Tinggi ?
4	Penyelenggaraan ujian untuk lulus <i>body of knowledge</i> .	Adakah ujian yang diselenggarakan untuk seseorang agar dinyatakan menguasai <i>body of knowledge</i> Pertanahan? Siapa yang menyelenggarakan?

Berikutnya pertanyaan ketiga, bagaimanakah inti materi pembelajaran yang diberikan oleh perguruan tinggi yang terkait pertanahan. Pertanyaan tersebut dapat dicari jawabnya dengan melihat materi inti pembelajaran perguruan tinggi yang mempelajari pertanahan seperti STPN.

Pertanyaan keempat atau yang terakhir, adakah ujian yang diselenggarakan untuk seseorang agar dinyatakan menguasai *body of knowledge* pertanahan, siapakah penyelenggaranya.

B. Ilmu Pengetahuan

1. Pengertian Ilmu

Definisi tentang ilmu banyak dijumpai diberbagai referensi. Kiranya cukup diambil tiga definisi yaitu menurut wikipedia, Undang Undang RI No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, dan kamus besar Bahasa Indonesia.

Menurut wikipedia, ilmu, sains, atau ilmu pengetahuan adalah seluruh usaha sadar untuk menyelidiki, menemukan, dan meningkatkan pemahaman manusia dari berbagai segi kenyataan dalam alam manusia. Segi-segi ini dibatasi agar dihasilkan rumusan-rumusan yang pasti. Ilmu memberikan kepastian dengan membatasi lingkup pandangannya, dan kepastian ilmu-ilmu diperoleh dari keterbatasannya. Ilmu bukan sekadar pengetahuan (*knowledge*), tetapi rangkuman sekumpulan pengetahuan berdasarkan teori-teori yang disepakati dan secara sistematis. Dalam Undang Undang RI No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dinyatakan bahwa ilmu pengetahuan adalah rangkaian pengetahuan yang digali, disusun, dan dikembangkan secara sistematis dengan menggunakan pendekatan tertentu, yang dilandasi oleh metodologi ilmiah untuk menerangkan gejala alam dan/atau kemasyarakatan tertentu. Dalam kamus besar Bahasa Indonesia, ilmu adalah pengetahuan tentang suatu bidang yang disusun

secara bersistem menurut metode tertentu, yang dapat digunakan untuk menerangkan gejala tertentu di bidang (pengetahuan) itu.

2. Syarat-syarat **ilmu**

Berbeda dengan pengetahuan (*knowledge*), ilmu merupakan pengetahuan khusus tentang apa penyebab sesuatu dan mengapa. Ada persyaratan ilmiah sesuatu dapat disebut sebagai ilmu:

- (1) *Objektif*. Ilmu harus memiliki objek kajian yang terdiri dari satu golongan masalah yang sama sifat hakikatnya, tampak dari luar maupun bentuknya dari dalam. Objeknya dapat bersifat ada, atau mungkin ada karena masih harus diuji keberadaannya. Dalam mengkaji objek, yang dicari adalah kebenaran, yakni persesuaian antara tahu dengan objek, sehingga disebut kebenaran objektif; bukan subjektif berdasarkan subjek peneliti atau subjek penunjang penelitian.
- (2) *Metodis*. Untuk mendapat ilmu dilakukan upaya-upaya untuk meminimalisasi kemungkinan terjadinya penyimpangan dalam mencari kebenaran. Konsekuensinya, harus ada cara tertentu untuk menjamin kepastian kebenaran. Metodis berasal dari bahasa Yunani “*Metodos*” yang berarti: cara, jalan. Secara umum metodis berarti metode tertentu yang digunakan dan umumnya merujuk pada metode ilmiah.
- (3) *Sistematis*. Dalam perjalanannya mencoba mengetahui dan menjelaskan suatu objek, ilmu harus teratur dan terumuskan dalam hubungan yang teratur dan logis sehingga membentuk suatu sistem yang berarti secara utuh, menyeluruh, terpadu, dan mampu menjelaskan rangkaian sebab akibat menyangkut objeknya. Pengetahuan yang tersusun secara sistematis dalam rangkaian sebab akibat merupakan syarat ilmu yang ketiga.
- (4) *Universal*. Kebenaran yang hendak dicapai adalah kebenaran universal yang bersifat umum (tidak bersifat tertentu). Contoh: semua segitiga bersudut 180° . Karenanya universal merupakan syarat ilmu yang keempat. Belakangan ilmu-ilmu sosial menyadari kadar ke-umuman (universal) yang dikandungnya berbeda dengan ilmu-ilmu alam mengingat objeknya adalah tindakan manusia. Karena itu untuk mencapai tingkat universalitas dalam ilmu-ilmu sosial, harus tersedia konteks dan tertentu pula.

3. Indikator Ilmu

Selain syarat-syarat ilmiah sebuah ilmu, secara rinci suatu objek kajian dapat menjadi sebuah ilmu dengan beberapa indikator. Groenendijk L et al (2012) menilai status sebuah subjek / kajian untuk menjadi disiplin ilmu akademik yang diakui diperlukan indikator-indikator, yaitu: definisi formal, dasar pengetahuan yang umum, element struktur pada jenjang perguruan tinggi, program dan mahasiswa tingkat sarjana, assosiasi akademik dan professional, buku teks, isitilah yang khas, beberapa *scholar* yang visible dan ikonik, beberapa peneliti yang mengidentifikasi diri terhadap disiplin, beberapa aturan yang diterima, hubungan yang kuat antara akademisi dan praktisi. Selain indikator-indikator tersebut terdapat indikator lain yang diinginkan: menyatukan teori-teori, prosedur dan metode inkuiri, permasalahan dan riset yang unik, visi yang tersharingkan, kesinambungan jurnal, dan komunitas riset bertaraf internasional.

Dalam menganalisisdisiplin *e-governance*, School (2008) menggunakan framework yang juga diterapkan oleh Groenendijk L et al (2012) dalam rangka mendeskripsikan dan menganalisis “ilmu” Administrasi Pertanahan sebagai suatu disiplin akademik. Indikator yang digunakan oleh School seperti pada tabel 2 berikut:

Tabel 2. Indikator Ilmu (Scholl, 2008)

Indikator
1. Definisi formal
2. Dasar Pengetahuan yang umum
3. Unifikasi teori
4. Visi yang tershare dari pentingnya bidang ilmu
5. Asosiasi akademis maupun professional
6. Peristilahan yang khas
7. Hubungan yang kuat antara akademisi dan praktisi
8. Permasalahan dan riset yang unik
9. Prosedur dan metode inkuiri yang diterima
10. Komunitas riset bertaraf internasional
11. Kesinambungan jurnal dan konferensi
12. <i>Ikon (scholar yang visible / ternama)</i>
13. Peneliti yang mengidentifikasi diri terhadap disiplin
14. Elemen struktur pada jenjang perguruan tinggi
15. Program dan mahasiswa sarjana
16. Buku teks

4. Disiplin ilmu

a. Pengertian Interdisiplin

Interdisiplin menggunakan kombinasi dua atau lebih disiplin dalam suatu kegiatan akademik (misalnya proyek penelitian). Interdisiplin membuat sesuatu yang baru dengan lintas batas atau pemikiran. Team interdisiplin diterapkan dalam pedagogik pendidikan atau pelatihan untuk menggambarkan studi yang menggunakan metode-metode dan kajian mendalam dari beberapa bidang ilmu yang telah ada. Interdisiplin melibatkan peneliti, anak didik, dan pendidik dengan tujuan menghubungkan dan menyatukan beberapa pemikiran akademisi, profesional dan teknolog – dengan pemikiran khas mereka – dalam menggapai tujuan. Kajian penyakit menular AIDS atau pemanasan global memerlukan pemahaman dari berbagai bidang ilmu untuk menyelesaikan masalah-masalah yang terabaikan. Interdisiplin diterapkan pada bidang ilmu yang jika dikaji oleh lembaga penelitian secara tradisional menjadi tak berguna atau tidak representative; sebagai contoh studi tentang perempuan atau studi tentang etika.

Interdisiplin sering digunakan dalam siklus pendidikan ketika para peneliti dari dua atau lebih bidang ilmu meyatukan pendekatannya dan memodifikasinya sehingga peneliti lebih cocok dengan permasalahan, dalam hal ini termasuk team ajar dimana peserta didik diberikan pemahaman suatu mata ajar dari berbagai bidang ilmu tradisional. Sebagai contoh, mata ajar penggunaan tanah (*land use*) akan tampak lain jika dikaji dari bidang ilmu yang berbeda, misalnya biologi, kimia, dan ekonomi.

b. Transdisiplin

Transdisiplin mengkonotasikan strategi penelitian yang lintas batas bidang ilmu untuk mendapatkan pendekatan holistik. Transdisiplin diterapkan pada penelitian yang focus pada masalah yang lintas batas dua atau lebih bidang ilmu, sebagai contoh penelitian tentang sistem informasi yang efektif untuk penelitian biomedis (lihat bioinformatik), dan dapat juga mengacu pada konsep atau metode yang mulanya dikembangkan oleh suatu bidang ilmu tetapi kemudian digunakan oleh bidang ilmu lainnya. Sebagai contoh, etnografi, yang awalnya dikembangkan dalam antropologi tetapi sekarang banyak digunakan oleh bidang ilmu lain seperti ekonomi, geografi, dan politik.

c. “Disiplin” bagian dari studi-studi interdisiplin

Dalam pendidikan tinggi disiplin merupakan cabang pembelajaran atau *body of knowledge* tertentu seperti fisika, psikologi, dan sejarah (Moran, 2010, p. 2). Menurut American Association for Higher Education and Accreditation (AAHEA), sebuah disiplin memiliki perbedaan substansi dan peristilahan; cara-cara mengorganisasi mereka sendiri dan mendefinisikan aturan untuk membuat argument dan pernyataan yang diakui atau dibenarkan oleh yang lain. Mereka memiliki cara-cara yang berbeda dalam berbicara tentang diri mereka dan tentang permasalahan, topic, dan isu yang terkait dengan subjek materinya (Schulman, 2002, pp. vi–vii).

Mary Taylor Huber and Sherwyn P. Morreale (2002) menambahkan bahwa setiap disiplin memiliki sejarah intelektualnya sendiri, perjanjian-perjanjian, dan cara –cara penyelesaian tentang materi subjek atau metoda; dan memiliki sendiri komunitas skolar yang tertarik pada pengajaran dan pembelajaran pada bidang tersebut. Sebuah disiplin juga dibedakan satu dengan lainnya oleh beberapa faktor , yaitu bagaimanakah disiplin memandang dunia, perspektifnya atau pandangan dunianya, kumpulan asumsi yang mereka gunakan, dan metoda yang mereka gunakan dalam membangun *body of knowledge* (fakta, konsep, teori) sekitar materi subjek/ pelajaran tertentu. (Newell & Green, 1982, p. 25).

Disiplin akademis adalah komunitas skolar yang melakukan studi spesifik suatu phenomena, mengkaji konsep-konsep inti tertentu dan mengorganisir teori-teori, mengembangkan metode-metode penelitian, mengadakan forum-forum untuk sharing penelitian dan pandangan-pandangan tajam, dan menawarkan jalur karier bagi para skolar. Melalui kekuatan karirnyalah, suatu disiplin dapat menjaga preferensi yang kuat. Setiap disiplin memiliki definisi elemennya sendiri – phenomena, asumsi-asumsi, epistemologi, konsep-konsep, teori-teori, dan metode-metode – yang membedakannya dengan disiplin lain.

Sebagai contoh, sejarah. Sejarah adalah sebuah disiplin karena semua criteria disiplin ada padanya. Domain pengetahuannya terdiri atas banyak fakta-fakta (segala sesuatu yang telah dicatat dalam sejarah manusia). Sejarah melibatkan banyak konsep-konsep atau ide-ide (kolonialisme, rasisme, kemerdekaan, dan demokrasi). Sejarah menghasilkan teori-teori tentang mengapa sesuatu terjadi seperti demikian itu, meskipun banyak sejarawan yang ateoritis. Dan lagi, sejarah menggunakan metode

riset yang melibatkan studi pustaka dan analisis kritis terhadap sumber-sumber utama (contoh: surat-surat, buku-buku catatan harian, dokumen-dokumen resmi), dan sumber-sumber tambahan (contoh: buku-buku, dan artikel-artikel suatu topic) untuk menyajikan gambaran yang koheren even-even atau orang-orang di masa lalu dalam tempat dan waktu tertentu.

d. Katagori disiplin tradisional dan rumpun ilmu

Secara luas terdapat tiga katagori disiplin tradisional; (1) Ilmu alam yang memberi tahu kita tentang dari apa bumi ini terbuat, menjelaskan bagaimana penyusunnya itu terstruktur sebagai jaringan yang rumit dalam sistem yang saling bergantung, dan menjelaskan perilaku dari sistem local yang given, (2) Ilmu sosial mencari penjelasan tentang dunia manusia dan memahami bagaimana memprediksi dan memperbaikinya, (3) Ilmu humaniora mengekspresikan aspirasi manusia, mengartikan dan menilai capaian-capaian dan pengalaman manusia, mencari tingkatan-tingkatan arti dan nilai dari detail tulisan tangan, artifak, dan hasil seni budaya.

Menurut Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi rumpun ilmu dibagi menjadi enam, yaitu ilmu Agama, Humaniora, Sains Sosial, Sains Alam, Sains Formal, dan Terapan. (UU Nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan Tinggi).

e. Bidang-bidang terapan dan professional (*The Applied and Professional Fields*)

Dalam perguruan tinggi modern, bidang terapan mendapat tempat tersendiri . Termasuk di dalamnya adalah bisnis (dan beberapa bagiannya seperti keuangan, pemasaran, dan manajemen), komunikasi (dan beberapa bagiannya seperti periklanan, pidato, dan jurnalisme), pengadilan criminal dan kriminologi, pendidikan, rekayasa, hukum, kedokteran, keperawatan, dan kerja sosial. Sebagai catatan banyak bidang- bidang terapan dan professional diklaim sebagai disiplin.

f. Kemunculan Interdisiplin-interdisiplin

Akhir-akhir ini garis yang tegas antara disiplin dan interdisiplin menjadi kabur dengan munculnya interdisiplin-interdisiplin. Semua itu termasuk bidang-bidang studi yang lintas batas disiplin ilmu tradisional dan melibatkan interaksi yang luas merentang dari kelompok-kelompok skolar informal sampai kepada komunitas-komunitas riset dan pengajaran yang telah mapan. Contoh ilmu interdisiplin yang sering adalah ilmu

syaraf (*neuro science*) dan biokimia, termasuk juga ilmu lingkungan, nano teknologi, geobiologi, ilmu dan teknik keberlanjutan (*sustainability*), psikolinguistik, etnomusikologi, studi budaya, studi perempuan, studi pedesaan, dan studi Amerika (Klein, 1990, p. 43; National Academy of Sciences, National Academy of Engineering, & Institute of Medicine, 2005, pp. 249–252).

Interdisiplin dibedakan dengan disiplin dalam hal origin, karakter, status, dan tingkat perkembangannya. Sebagai contoh, interdisiplin biologi molekuler berkembang sebagai terobosan atas penemuan struktur DNA dan perkembangan teknologi-teknologi baru. Hanya dengan membawa secara bersama keterampilan dan pengetahuan berbagai macam ahli berbagai disiplin – ahli kimia, ahli genetik, ahli fisika, ahli bakteri, ahli binatang, dan ahli tumbuhan – maka akan banyak permasalahan dapat dipecahkan (Sewell, 1989, pp. 95–96).

g. Dua konsep studi interdisiplin: generalis, dan integralis

Fokus utama yang menjadi perdebatan dalam studi interdisiplin adalah integrasi. Integrasi adalah sebuah proses yang padanya ide-ide, data dan informasi-informasi, metoda-metoda, cara-cara, konsep-konsep, dan atau teori-teori dari dua atau lebih disiplin disintesakan, dihubungkan, atau dibaurkan. Dalam kaitan ini dibedakan antara generalis interdisiplin, dan integralis interdisiplin. Generalis interdisiplin diartikan sebagai bentuk-bentuk dialog atau interaksi antara dua atau lebih disiplin yang mana meminimalisasi, menyembunyikan, merejek; semua itu merupakan cara-cara integrasi (Moran, 2010, p. 14).

Sebaliknya, integralis interdisiplin memandang bahwa integrasi seharusnya menjadi tujuan dari pekerjaan interdisiplin karena integrasi mengarah pada mencari jawaban dari kompleksitas permasalahan. Integralis memusatkan perhatian pada tumbuhnya pustaka yang terhubung dengan pendidikan dan riset interdisiplin, dan menitikberatkan pada perkembangan teori distingtif yang didasari riset interdisiplin dan gambaran bagaimana semua itu berjalan. (Newell, 2007a, p. 245; Vess & Linkon, 2002, p. 89).

BAB III

MEMBANGUN *BODY OF KNOWLEDGE* DAN ILMU

Banyak profesi yang telah membangun *body of knowledge*. Sebagai contoh, *body of knowledge* manajemen proyek [PMBOK, 1996], *body of knowledge* teknik perangkat lunak [SE, 2004], *body of knowledge* analisis bisnis [BABOK, 2007], *body of knowledge* manajemen data [DAMA, 2010], *body of knowledge* regulasi infrastruktur [Jamison, et. al., 2008], *body of knowledge* teknik sipil [ASCE, 2004], *body of knowledge* GIS dan teknologi [AAG, 2006].

Penting diperhatikan, sering terjadi ada overlap atau memiliki hubungan antara *body of knowledge* profesi yang satu dengan lainnya. Sebagai contoh *body of knowledge* teknik sipil dan GIS teknologi bersinggungan dengan *body of knowledge* surveying. Fakta ini menunjukkan bahwa *body of knowledge* sebuah profesi semakin penting untuk dipisahkan dengan profesi lainnya sebagai sesuatu yang unik dan untuk keperluan pengembangan *body of knowledge* itu sendiri.

A. Perumusan *Body of Knowledge* Surveying

Secara konseptual ada dua pendekatan yang berbeda dalam membangun *body of knowledge*. *Pertama*, menyediakan outline pengetahuan secara umum tanpa dirinci menjadi pengetahuan spesifik berdasarkan pada area-area pengetahuan teknis dan topik-topik. Sebagai contoh, beberapa *body of knowledge* memerlukan pengetahuan dasar matematika, fisika, komunikasi, humaniora, ilmu sosial, bisnis dll. Pengetahuan ini (dikombinasikan dengan keterampilan penyelesaian masalah dan kemampuan merancang) merupakan bangunan kokoh untuk seorang insiyur professional. *Kedua*, menyediakan daftar area-area pengetahuan dan topik-topik secara rinci dalam konteks profesi teknis.

Menurut Greenfeld Joshua (2010) *body of knowledge* dapat didefinisikan dengan dua pendekatan. Pertama, dengan cara membangun garis besar keterampilan, attitude dan pengetahuan yang perlu bagi seseorang untuk paham dan mampu menjadi ahli professional. Kedua, dengan cara mengkompilasi secara rinci teori, metodologi, teknologi, dan prosedur yang perlu dikuasai pada praktik para professional. Kedua pendekatan itu diperlukan sehingga akan ada dua level *body of knowledge*; tingkat makro dengan definisi terminology konsep, dan tingkat mikro yang mendefinisikan keperluan praktis professional.

Pada tingkat makro, *body of knowledge* surveying didefinisikan dengan criteria 2000 assesmen outcome dari *Accreditation Board for Engineering and Technology* (ABET 2000). Dengan cara yang mirip, tingkat makro *body of knowledge* diadopsi dari American Society of Civil Engineers (ASCE) [ASCE 2004 and 2008].

Pada tingkat makro surveying terdiri dari [Greenfeld and Potts, 2008]:

- (1) Pengetahuan inti teknis dan turunannya yang ada dalam matematika, statistic, ilmu komputer, dan pengetahuan alamiah (dalam hal ini fisika). Pengetahuan ini merupakan dasar untuk penerapan terhadap prinsip-prinsip untuk menghitung, menganalisa posisi, dan memahami peralatan yang sedang digunakan.
- (2) Pengetahuan yang luas tentang hukum, etika dan profesionalisme. Pada tingkat makro ini tidak hanya sebatas pada hukum yang terkait dengan penetapan batas (*boundary law*). Namun, lebih dari itu yaitu pengetahuan yang umum tentang hukum, sistem hokum, apa itu etika, dan apa yang terkait dengan profesionalisme.
- (3) Komunikasi, sejarah, ilmu sosial, dan isu-isu kontemporer. Karena dunia di sekitar kita terus berubah, keperluan akan informasi spasial semakin meluas untuk keperluan-keperluan yang baru. Tambahan lagi, konteks yang sedang digunakan juga berubah. Selain itu, untuk menjadi professional haruslah mampu berkomunikasi secara tulisan dan lisan.
- (4) Bisnis, ekonomi, dan manajemen. Banyak surveyor yang menjalankan sendiri perusahaan atau mengelola bagian surveying pada sector swasta ataupun publik. Surveyor kontemporer / modern haruslah mampu mengelola proyek, kontrak, orang, bujet, jadual, keuangan, pemasaran dan sales, waktu tagihan, ongkos pengeluaran, keuntungan dll.

Body of knowledge pada tingkat mikro, salah satu sumber berasal dari kompilasi US *National Council of Examiners for Engineering and Surveying* (NCEES). *Body of knowledge* pada Tingkat mikro untuk kasus GIS dapat diadopsi dari *Association of American Geographers* (AAG) and *the University Consortium for Geographic Information Science* (UCGIS) [AAG 2006].

Pada tingkat mikro *Body of knowledge surveying* [Greenfeld, 2010], didasarkan pada definisi FIG dan peran dari surveyor professional, *body of knowledge surveying* ASCM memunculkan 5 bagian body of knowledge yaitu

- 1) *Body of knowledge* penentuan posisi ; termasuk di dalamnya Geodesy, GPS dan survey pengimpulan data lainnya;
- 2) *Body of knowledge* GIS; termasuk di dalamnya pemetaan dan kartografi
- 3) *Body of knowledge* citra; termasuk di dalamnya fotogrametri, penginderaan jauh, teknologi berbasis citra/sensor seperti laser sacaner;
- 4) *Body of knowledge* hukum; termasuk di dalamnya hukum batas, hokum bisniss, dan hukum real property;
- 5) *Body of knowledge* pengembangan tanah; termasuk di dalamnya konstruksi, perencanaan dan pengembangan desa/kota/wilayah.

BAB IV

ILMU ILMU TERKAIT

A. Administrasi Pertanahan

Definisi Administrasi Pertanahan.

- 1) “The process of recording and disseminating information about ownership, value, and use of land when implementing land management policies” UNECE (1996). Administrasi pertanahan adalah proses perekaman dan diseminasi informasi tentang kepemilikan, nilai, dan penggunaan tanah dalam rangka implementasi kebijakan manajemen pertanahan.
- 2) “Those public sector activities required to support the alienation, development, use, valuation, and transfer of land” Dale & McLaughlin (1999). Administrasi pertanahan merupakan aktivitas-aktivitas sector public yang diperlukan untuk mendukung pemberian hak, pembangunan, penggunaan, valuasi, dan transfer tanah
- 3) “The set of systems and processes for making land tenure rules operational. It includes the administration of land rights, land use regulations, and land valuation and taxation. Land administration may be carried out by agencies of the formal state, or informally through customary leaders FAO (2002). Administrasi pertanahan adalah sekumpulan sistem-sistem dan proses-proses yang membuat beroperasinya aturan-aturan land tenure. Dalam hal ini termasuk administrasi hak atas tanah, regulasi penggunaan tanah, dan valuasi serta pajak tanah. Administrasi pertanahan mungkin dilakukan secara formal oleh Negara atau secara informal oleh kepala-kepala adat.
- 4) “The process of determining, recording and disseminating information about ownership, value, and use of land when implementing land management policies, UNECE (2005). Administrasi pertanahan adalah

proses penentuan, perekaman dan diseminasi informasi tentang kepemilikan, nilai, dan penggunaan tanah dalam rangka implementasi kebijakan manajemen pertanahan.

- 5) “The processes run by government using public- or private-sector agencies related to land tenure, land value, land use, and land development”. Williamson, et al., (2010). Administrasi pertanahan adalah proses yang dilakukan oleh pemerintah dengan menggunakan lembaga sector public atau privat terkait dengan land tenure, nilai tanah, penggunaan tanah, and pembangunan tanah.
- 6) “The study of how people organize land. It includes the way people think about land, the institutions and agencies people build, and the processes these institutions and agencies manage” Williamson, et al., (2010). Administrasi pertanahan studi bagaimana orang mengorganisir tanah. Termasuk di dalamnya cara orang berpikir tentang tanah, lembaga-lembaga atau agen-agen yang dibangun, dan proses lembaga-lembaga atau agen-agen dikelola.

B. Manajemen Pertanahan

Manajemen pertanahan adalah suatu proses yang mana sumberdaya tanah diposisikan sedemikian rupa mempunyai dampak yang menguntungkan (UN-ECE 1996). Manajemen pertanahan mengarah pada seluruh kegiatan yang terkait dengan pengelolaan tanah dan sumber daya alam yang diperlukan untuk mencapai pembangunan berkelanjutan.

Struktur organisasi manajemen pertanahan berbeda macamnya antar negara-negara atau regional-regional di dunia ini, dan merefleksikan budaya setempat dan setting yudisialnya. Tata kelola institusional bisa jadi berubah-ubah sepanjang waktu untuk mendukung secara lebih baik inplementasi kebijakan pertanahan dan tatakelola yang baik.

Di dalam konteks negara, aktivitas manajemen pertanahan dapat dideskripsikan dengan tiga komponen: kebijakan-kebijan pertanahan, infrastruktur-infrastuktur informasi pertanahan, dan infrastruktur-infrastuktur administrasi pertanahan dalam mendukung pembangunan berkelanjutan.

Kebijakan pertanahan merupakan bagian dari kebijakan nasional dalam mempromosikan tujuan-tujuan termasuk di dalamnya pembangunan ekonomi, keadilan sosial dan persamaan, dan stabilitas politik. Kebijakan tanah bisa jadi terkait dengan: keamanan kepemilikan penguasaan

tanah; pasar tanah (khususnya transaksi tanah dan akses kredit); pajak real property; manajemen berkelanjutan dan control penggunaan tanah, sumber daya alam dan lingkungan; pembagian tanah bagi yang tidak mampu, suku minoritas dan perempuan; dan mengukur untuk mencegah spekulasi tanah dan untuk mengelola sengketa tanah.

Komponen operasional dari paradigm manajemen pertanahan merupakan bentangan fungsi-fungsi administrasi pertanahan yang menjamin pengelolaan yang baik terhadap 3R (hak tanah, batasan, dan tanggung jawab), dan resiko-resiko dalam kaitannya dengan property, tanah, dan sumber daya alam. Termasuk dalam fungsi-fungsi ini yaitu pemilikan penguasaan tanah, nilai tanah, penggunaan tanah dan pengembangan tanah. Fungsi-fungsi administrasi pertanahan didasarkan dan difasilitasi oleh infrastruktur informasi pertanahan yang handal yang termasuk didalamnya kumpulan data kadatral dan topografi dan menyediakan akses penuh dan informasi terkini tentang lingkungan buatan dan alam.

Manajemen pertanahan dikatakan berjalan baik jika dapat mengimplementasikan kebijakan-kebijakan secara komprehensif dan berkelanjutan. Namun demikian, di beberapa negara ada yang memisahkan hak pemilikan penguasaan dengan hak penggunaan tanah. Dengan demikian tidak ada mekanisme lembaga yang efektif yang menghubungkan control perencanaan dan penggunaan tanah dengan nilai tanah dan pasar tanah. Keadaan ini diperburuk dengan buruknya administrasi dan manajemen yang gagal memberikan pelayanan. Investasi terhadap teknologi tidaklah memberikan banyak solusi terhadap permasalahan yang lebih dalam; yaitu kegagalan memperlakukan tanah dan sumberdayanya secara koheren/komprehensif.

BAB V

BODY OF KNOWLEDGE PERTANAHAN DARI PENDEKATAN KURIKULUM

A. Capaian Pembelajaran

Capaian pembelajaran program diploma IV pertanahan sebagai berikut:

- (1) Capaian Pembelajaran dalam cakupan sikap (sudah ditetapkan dalam SNPT):
 - a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esadan mampu menunjukkan sikap religius;
 - b. menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral dan etika;
 - c. berkontribusi dalam peningkatan mutu peradaban kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berdasarkan Pancasila;
 - d. berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa;
 - e. menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain;
 - f. bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan;
 - g. taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;
 - h. menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik;
 - i. menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri; dan
 - j. menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan.

- (2) Capaian Pembelajaran dalam cakupan Pengetahuan:
- a. menguasai konsep berbagai metode dan teknik survey pengukuran dan pemetaan informasi geospasial dasar dan tematik, survey pengukuran dan pemetaan;
 - b. menguasai prinsip-prinsip hukum administrasi negara, hukum tata negara, hukum adat, hukum perdata, hukum acara perdata dan TUN serta konsep hukum agraria khususnya hukum tanah;
 - c. menguasai prinsip-prinsip pemanfaatan teknologi informasi khususnya aplikasi perangkat lunak pengolahan data dan informasi pertanahan;
 - d. menguasai paradigma dan konsep keberagaman sosial, dan budaya masyarakat;
 - e. menguasai prinsip-prinsip dan konsep fungsi-fungsi administrasi khususnya yang terkait pengelolaan pertanahan.
 - f. Menguasai konsep ilmu kebumih yang terkait bidang pertanahan;
- (3) Capaian Pembelajaran dalam cakupan Keterampilan Umum (sudah ditetapkan dalam SNPT):
- a. mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, inovatif, bermutu, dan terukur dalam melakukan pekerjaan yang spesifik di bidang pertanahan serta sesuai dengan standar kompetensi kerja bidang pertanahan;
 - b. mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur;
 - c. mampu mengkaji kasus penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi bidang pertanahan yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan bidang pertanahan dalam rangka menghasilkan prototipe, prosedur baku, desain, menyusun hasil kajiannya dalam bentuk kertas kerja, spesifikasi desain, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi;
 - d. mampu mengambil keputusan secara tepat berdasarkan prosedur baku, spesifikasi desain, persyaratan keselamatan dan keamanan kerja dalam melakukan supervisi dan evaluasi pada pekerjaannya;
 - e. mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja sama dan hasil kerja sama didalam maupun di luar lembaga;
 - f. mempunyai kepemimpinan untuk melakukan supervisi dan evaluasi penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pegawai yang berada di bawah tanggungjawabnya;
 - g. mampu bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok

- serta mampu melakukan pembelajaran secara mandiri; dan
- h. mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi.
- (4) Capaian Pembelajaran dalam cakupan Keterampilan Khusus:
- a. mampu merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi pelaksanaan survei, pengukuran dan pemetaan untuk kepentingan bidang pertanahan dengan menggunakan dan memanfaatkan berbagai metode dan instrumen survei pengukuran pemetaan berbasis IPTEK dan terkini, sesuai dengan standar proses dan mutu;
 - b. mampu mengolah, menelaah dan memberi penilaian terhadap data dan informasi sebagai dokumen dalam rangka penetapan hak, pendaftaran tanah dan pemberian izin-izin di bidang pertanahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan menerapkan konsep dan teori hukum sesuai dengan standar proses dan mutu;
 - c. mampu mengkaji peraturan di bidang pengaturan dan penetapan hak atas tanah, hak milik atas satuan rumah susun, hak guna atas ruang di atas, di bawah tanah dan ruang perairan dan menyampaikan kajiannya sebagai pertimbangan dalam pengambilan kebijakan di bidang pengaturan dan penetapan hak;
 - d. mampu merancang desain, melaksanakan dan mengembangkan model-model Landreform dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat untuk peningkatan kesejahteraan rakyat;
 - e. mampu menyusun rancangan bentuk pemberdayaan masyarakat di bidang pertanahan;
 - f. mampu melakukan pengumpulan, pengelolaan dan pengolahan data penguasaan, pemilikan, penggunaan, pemanfaatan tanah dan menyajikan dalam bentuk informasi tektual dan spasial dengan memanfaatkan metode dan media berbasis teknologi informasi terkini, sesuai dengan standar proses dan mutu;
 - g. mampu menyusun risalah pertimbangan teknis pertanahan dalam rangka penetapan lokasi, izin lokasi dan izin perubahan penggunaan tanah, dengan memanfaatkan metode dan media berbasis teknologi informasi terkini, sesuai dengan standar proses dan mutu;

- h. mampu menyusun necara perubahan, kesesuaian penggunaan dan pemanfaatan, neraca prioritas ketersediaan tanah nasional, regional dan sektoral dalam rangka pelaksanaan tataruang;
- i. mampu merancang penatagunaan tanah pada wilayah darat, wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, perbatasan dan wilayah tertentu dengan memanfaatkan sistem informasi geografi;
- j. mampu mengkaji pelaksanaan dan permasalahan penertiban dan pendayagunaan tanah terlantar serta pengelolaan tanah Negara dan tanah kritis;
- k. mampu mengkaji pengaturan dan pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum dan menghasilkan simpulan dari hasil kajian dan pengembangan tersebut;
- l. mampu melakukan kegiatan penilaian bidang tanah, zona nilai tanah, zona nilai ekonomi kawasan dan aset kawasan serta penyajiannya dengan memanfaatkan metodologi, analisa model, aplikasi teknologi pengolahan data tekstual dan spasial berbasis IPTEK terkini;
- m. mampu mengidentifikasi potensi objek konsolidasi tanah dan merancang desain konsoli dasi tanah dengan memadukan konsep, teoriilmuhukum, survei, administrasi, dansosial;
- n. mampu melakukan kajian terhadap berbagai masalah, sengketa, konflik danperkara pertanahan dan menyajikan pilihan terbaik dari berbagai alternatif penanganan masalah sengketa, konflik dan perkara pertanahan untuk dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan.
- o. Mampu melakukan penatausahaan kepegawaian, keuangan dan barang milik negara sesuai dengan standar proses dan mutu

B. Kurikulum

Contoh Kurikulum program diploma IV pertanahan sebagai berikut:

Tabel 3. mata kuliah Konsentrasi Manajemen Pertanahan

Rumpun	Mata Kuliah(SKS)	Jumlah
Agama	1. Pend. Kewarganegaraan (1) 2. Pendidikan Pancasila (1) 3. Pendidikan agama (1) 4. Etika Profesi (2)	5

Sains Sosial	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sosiologi Pertanian (2) 2. Pemberdayaan Masyarakat (2) 3. KKN Pertanian (2) 	6
Humaniora	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bahasa Inggris (1) 2. Praktik B. Inggris (2) 3. Bahasa Indonesia (2) 	5
Sains Alam	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ilmu Alamiyah Dasar (2) 	2
Sains Formal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Matematika (2) 2. Statistika (3) 	5
Terapan (Hukum) Land Tenure	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengantar Ilmu Hukum & Tata Hukum Ind. (2) 2. Hukum Agraria (3) 3. Hukum TN & Hukum AN (3) 4. Hukum Perdata (2) 5. Hukum Acara Perdata (2) 6. Hukum Adat (2) 7. Pengadilan PTUN (2) 8. Hukum Waris (2) 9. Praktik Hukum Waris (1) 10. Hak Jaminan Atas Tanah (2) 11. Praktik Akta Peralihan Hak (2) 12. Praktik Tata Laksana Pengkajian dan Penanganan Sengketa & Konflik Pertanian (3) 13. Praktik Penanganan Sengketa & Perkara Pertanian (2) 14. Perbandingan Hukum Tanah (2) 15. Praktik Mediasi Sengketa dan Konflik Pertanian (1) 	31
Terapan (Pengukuran dan Pemetaan)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dasar-dasar pengukuran (1) 2. Praktik Dasar-dasar Pengukuran Tanah (2) 3. Kartografi Terapan (1) 4. Praktik Kartografi Terapan (2) 5. Kerangka Dasar Pemetaan (1) 6. Praktik Kerangka Dasar Pemetaan (2) 7. Pengolahan Data Digital (1) 8. Praktik Pengolahan Data Digital (2) 9. Penginderaan Jauh (1) 10. Praktik Penginderaan Jauh (2) 11. Pengukuran dan Pemetaan Kadastral (1) 12. Praktik Pengukuran dan Pemetaan Kadastral (2) 13. SIG (1) 14. Praktik SIG (2) 15. Praktik Tata Laksana Survei Penguk. dan Pemetaan (3) 16. PKL I : Pemetaan Tematik (2) 17. PKL II: Penguk Pemet Bidang Tnh & Penilaian Tanah (2) 	28

Terapan (Administrasi) Land Tenure	<ol style="list-style-type: none"> 1. Administrasi pertanahan (2) 2. Dasar-dasar Pendft Tanah (2) 3. Rumah Susun (2) 4. Pendaft. Tanah Pertama kali (1) 5. Praktik Pendaft. Tanah Pertama kali (2) 6. Pemberian HAT (1) 7. Praktik Pemberian HAT (2) 8. Pemeliharaan Data Pendaftaran Tanah (1) 9. Praktik Pemeliharaan Data Pendaftaran Tanah (2) 10. Administrasi Perkantoran (2) 11. Praktik Tata Laksana Ketatausahaan Kantah (3) 12. Praktik Tata Laksana HAT & PT (3) 13. Manjemen Mutu (2) 	25
Terapan (Penilaian) Land Value	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penilaian Aset & Property (2) 2. Penilaian Bidang Tanah (2) 3. Penilaian kawasan (2) 	6
Terapan (Planologi) Land Use Land Development	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ekologi Sumberdaya Agraria (2) 2. Penatagunaan Tanah (1) 3. Praktik Penatagunaan Tanah (2) 4. Konsolidasi Tanah (1) 5. Praktik Konsolidasi Tanah (2) 6. Pengadaan Tanah (3) 7. Praktik Tata Laksana PPP (2) 8. Praktik Tata Laksana Pengadaan Tnh utk Kepentingan Umum (2) 9. Tata Ruang dan Perencanaan Wilayah (2) 10. Penataan Pertanahan Berbasis Kebencanaan (2) 11. PKL III : Inventarisasi P4T & SIP (2) 	21
Terapan (Politik) Land Policy	<ol style="list-style-type: none"> 1. Politik Pertanahan (2) 2. Land Reform di Indonesia (1) 3. Praktik Land Reform di Indonesia (2) 4. Reforma Agraria (2) 	7
Lain-lain	<ol style="list-style-type: none"> 1. Metodologi Penelitian (3) 2. Skripsi (4) 	7

Tabel 4. Rekapitulasi Matakuliah, rumpun ilmu, sistem kadastral dan kajian

No	SKS	%	Rumpun ilmu	Manajemen Pertanahan ; Sistem kadastral	Kajian
1	5	3	Agama		
2	6	4	Terapan - Sosial	Land Policy	Sosial
3	5	3	Humaniora		
4	2	1	Sains Alam		
5	5	3	Sains Formal		
6	31	21	Terapan - Hukum	Land Tenure	Hukum
7	28	19	Terapan - Pengukuran dan pemetaan	Land Tenure	Fisik-Spasial
8	25	17	Terapan - Administrasi	Land Tenure	Administrasi
9	6	4	Terapan - Penilaian	Land Value	Fisik-Spasial
10	21	14	Terapan- Planologi	Land Use + Land development	Fisik-Spasial
11	7	5	Terapan - Politik	Land Policy	Politik
12	7	5	Lain-lain		
Jumlah	148	100%			

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. *Body of knowledge* pertanahan lebih dari 80 % didominasi oleh rumpun ilmu terapan;
2. *Body of knowledge* pertanahan ilmu terapan yang dipelajari di STPN yaitu Hukum (21%), Pengukuran dan pemetaan (19 %), Administrasi (17 %), Planologi (14 %), Politik (5 %), Penilaian (4 %), sosial (4 %);
3. *Body of knowledge* pertanahan berdasarkan komposisi komponen-komponen dalam manajemen pertanahan yang di dalamnya termasuk sistem kadastral, secara berturut turut kurikulum Program Studi Pertanahan STPN didominasi oleh Land Tenure (57%), Land Use dan Land Development (14%), Land Policy (9 %), dan Land Value (4%);
4. *Body of knowledge* pertanahan menurut komposisi kajian dapat dibedakan menjadi kajian fisik-spasial (37%), Hukum dan Adminstrasi (38 %), dan Sosial Politik (9%)
5. Pertanahan mengarah kepada studi interdisiplin dengan mengarah kepada “ilmu” Administrasi Pertanahan (*Land Administration*);

B. Saran

1. Untuk menjadi sebuah ilmu interdisiplin, Pertanahan harus secara sistematis melakukan riset interdisiplin sehingga dihasilkan metode yang distingtif dengan kajian lainnya;
2. Sebagai studi yang sedang berkembang, pertanahan perlu membukukan peristilahan atau terminology peratanahan yang unik sebagai suatu konsep yang bisa menjelaskan phenomena di bidang pertanahan;
3. Perlu dilakukan upaya untuk terus mewujudkan pertanahan sebagai “profesi” dengan membakukan *Body of knowledge* profesi pertanahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Greenfeld Joshua, 2010, *Surveying Body of Knowledge*, FIG Congress, Facing the Challenges – Building the Capacity, Sydney, Australia, 11-16 April 2010.
- Groenendijk L et al, 2012, *Land administration as an academic discipline: to be, or not to be*, FIG Working Week 2012
- Joe Moran, *Interdisciplinarity* (Routledge, 2010), 2. The several quotes that make up this paragraph came to the author's attention by way of Repko's careful work.
- Lee Shulman, "Foreword," in *Disciplinary Styles in the Scholarship of Teaching and Learning*, ed. Mary Taylor Huber and Sherwyn P. Morreale (Washington: American Association of Higher Education, 2002), vi – vii.
- Mary Taylor Huber and Sherwyn P. Morreale, *Disciplinary Styles in the Scholarship of Teaching and Learning* (Washington: American Association of Higher Education, 2002), 2. See also Marietta del Favero, "Academic Disciplines," *Encyclopedia of Education* second edition (Macmillan Reference USA, 2002).
- Pujiriyani DW, Sudirman S, Wakhid A, 2014, *Merancang Metode Penelitian Agraria Lintas Disiplin*, STPN Press.
- Sutaryono, Nugroho T, Afifi I, 2014, *Telaah Awal Ilmu Agraria lintas Disiplin Tinjauan Filsafat Ilmu*, STPN Press.
- Syaifulloh. Arief dan Nuraini Aisiyah, *Eksistensi Program Diploma I Pengukuran dan Pemetaan Kadastral*, Makalah Seminar Nasional FIT ISI 2013.
- Thompson Klein, Julie, *Interdisciplinarity –history, theory, end practice* . Detroit: Wayne State University Press, 1990.
- William H. Newell and William J, Green, "Defining and Interdisciplinary Studies," *Improving College and University Teaching* 30 (1982): 23-30, 25
- Williamson, I.P., Enemark, S., Wallace, J. and Rajabifard, A. 2010. *Land Administration for Sustainable Development*. Published by ESRI Press Academic, Redlands, California. ISBN 978-158948-041-4.